

**PERAN TRANSFORMASIONAL LSM
BAGI PEMBELAJARAN POLITIK RAKYAT**

Oleh:

Arif Rohman

Dosen Jurusan FSP FIP UNY

Abstract

Economic policies that spoil only big conglomerates and foreign capitalist and political policies that continuously restrict and ignore democratic values and human rights have made lay people and civil power weak. Therefore, Non-Government Organizations (NGOs) as voluntary organizations, especially in 1990s, tried to empower the civil people in order to be able to face the government. NGOs made such an attempt to achieve the aspiration of making a civil society into reality; the society is not natural society or political society anymore, but a society in the highest level, namely civil society. It is a society whose members have an independent attitude, an ability to develop the self, and an ability to restrict the government intervention in the reality that they have created as the space of their own activities.

Key words: NGOs, empowerment, civil society.

A. Pendahuluan

Menurut Mochtar Mas'ud (1997) salah satu model pendekatan rejim Orde Baru dalam memerintah adalah pendekatan yang memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan negara (*state*) sebagai aktor utama pembangunan. Pendekatan ini dikenal sebagai "*politik sebagai panglima*" yang menempatkan kekuasaan politik dengan ideologi "*statist*" untuk melakukan intervensi ke dalam segenap kehidupan warga negara dengan alasan pembenar "*pembangunan*". Asumsinya adalah kekuatan negara diidentikkan dengan terjaminnya keberlangsungan pembangunan demi mencapai keberhasilan pembangunan (kemakmuran rakyat).

Dengan alasan tersebut itulah, negara Orde Baru yang dimulai sejak kemunculannya tahun 1967 sampai akhir 1990-an semakin lama semakin berani menampakkan wajah represifnya untuk menindas segenap kekuatan sipil yang dianggapnya "*membanggang*" apalagi sampai "*melawan*" negara. Potret penindasan ini mencapai klimaknya ketika semakin banyak warga sipil yang kehilangan hak-haknya, tidak saja hak-hak *ekonomi* (seperti hak: bekerja secara aman, memperoleh gaji secara layak, memiliki tanah) serta hak-hak *politik* (seperti hak: berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan mendapatkan

perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan), akan tetapi juga sudah sampai pada hak hidup sebagai manusia. Pada puncak penindasan itulah, hak-hak warga sipil telah dirampas oleh negara dengan menafikan kaidah-kaidah demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM). Dalam kondisi yang demikian, *NGO (Non Government Organization)* atau yang lazim dikenal dengan LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) tampil melakukan advokasi untuk memberdayakan kekuatan-kekuatan sipil di luar negara. Keberadaan LSM, terutama pada era 1990-an, menurut Bonnie Setiawan merupakan organisasi yang mendorong pada tumbuhnya gerakan rakyat dengan ideologi "*gerakan demokrasi dan Hak Azasi Manusia*". Hal ini terlihat pada kode etik LSM yang disusun Badan Musyawarah Bina Desa yang berbunyi "Insan LSM senantiasa berjuang untuk mewujudkan demokrasi dan karenanya selalu bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan demokratis untuk mencapai susunan masyarakat demokratis yang tanpa kekerasan (*non-violence*) dalam semua dimensi"³.

Upaya pembelaan dan pemberdayaan masyarakat oleh LSM ini menjadi lebih kokoh dikarenakan basis ideologis yang dikonstruksi oleh LSM di Indonesia pada waktu itu adalah mengadopsi teori Neo-Marxis seperti dari Antonio Gramsci sehingga tak pelak lagi, pada pertengahan Mei 1998, upaya gigih LSM tersebut bersama kekuatan-kekuatan masyarakat sipil lain termasuk mahasiswa, akhirnya berhasil 'menjungkalkan' rejim Orde Baru dari tampuk kekuasaan absolutnya. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan lebih jauh mengenai peran historis LSM dalam memberdayakan dan membelajarkan masyarakat sipil demi melampaui penindasan negara selama Orde Baru.

B. Pembahasan

1. Developmentalisme dan Kelahiran LSM

Pada dasarnya timbulnya gerakan LSM di Indonesia khususnya dan negaranegara berkembang umumnya tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan di masing-masing negara tersebut. Sehingga perbincangan mengenai lahirnya LSM khususnya di Indonesia tidak terlepas dari diskursus pembangunan (*developmentalisme*).

Sejak tahun 1970-an setelah rejim Orde Baru berkuasa, "*pembangunan*" telah menjadi semacam "*agama baru*:" ataupun ideologi baru. Pembangunan menjanjikan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan nasib hidup bangsa Indonesia yang telah porak poranda akibat kebangkrutan ekonomi peninggalan Orde Lama. Pembangunan yang dirancang oleh Orde Baru ini diadopsi dari konsep yang dikembangkan para ilmuwan sosial yang tergabung dalam

"Center for International Studies " di *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* yang kemudian disebarkan dan diterapkan ke hampir seluruh negara berkembang oleh IMF untuk membantu negara-negara dunia ketiga yang mereka katakan sebagai negara "terbelakang" (*underdevelopment*). Dari sinilah muncul paradigma pembangunan model Barat dimana pembangunan dipahami sebagai tahap demi tahap menuju "*modernitas*". Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju.

Hasil kajian dan lokakarya para ahli ilmu sosial tersebut di atas akhirnya terakumulasi teori-teori tentang pembangunan dan modernisasi. Diantara para ahli tersebut adalah W. W. Rostow yang menciptakan "*Teori Pertumbuhan*" dan juga David Mc. Clelland dan Alex Inkeles yang mengembangkan "*Teori Modernisasi*".

Ada beberapa unsur dalam teori modernisasi, di antaranya adalah paham modernisasi yang menekankan metafora "*pertumbuhan*" sebagaimana organisme mahluk hidup. Bagi penganut paham ini, pembangunan dilihat dari perspektif evolusioner yakni merupakan perjalanan panjang dari keadaan "*tradisional*" ke keadaan "*modern*". Asumsinya adalah, semua masyarakat pernah mengalami keadaan yang sama (tradisional), maka masyarakat dunia ketiga juga akan melewati perjalanan yang sama sebagaimana yang dilewati masyarakat Barat, yang akhirnya bisa menjadi masyarakat "*modern*". Paham modernisasi organisme inilah yang sangat terkenal dengan "skema lima tahap" (*five-stages scheme*) perkembangan masyarakat oleh Rostow. Menurut Rostow dan pengikutnya, bahwa perubahan akan berjalan bertahap dari yang bersifat tradisional menuju ke modern melalui proses tahap-tahap sebagaimana yang dijalani negara maju. Perkembangan yang diarahkan dengan model seperti ini menekankan proses pembangunan dengan cara "memperbesar modal" (*capital accumulation*) dalam bentuk "*tabungan*" dan "*investasi*".

Penjelasan mengenai mengapa negara dunia ketiga termasuk Indonesia menjadi "*miskin*", dikarenakan kurangnya akumulasi modal untuk membiayai berbagai investasi. Karena itu untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan suntikan modal asing (bantuan luar negeri dan masuknya investor asing) guna memperbesar akumulasi modal untuk investasi pembangunan. Dengan demikian *surplus* akan diperoleh yang pada gilirannya dapat meningkatkan "pertumbuhan ekonomi" (*economic growth*).

Sedang paham modernisasi yang kedua adalah paham yang tidak melihat dari

pendekatan ekonomik akan tetapi pada sosiologis dan psikologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh David McClelland dan Alex Inkeles. Menurut Clelland, untuk membangun suatu masyarakat supaya bisa menjadi masyarakat yang maju dan modern, maka individu-individu dalam masyarakat tersebut harus memiliki personalitas atau karakter manusia modern yang ia katakan sebagai memiliki "motivasi berprestasi" (*need for Achievement*). Sehingga pertanyaan mengapa negara dunia ketiga menjadi "terbelakang", dijelaskan karena mereka tidak memiliki dorongan atau motivasi untuk berprestasi. Prototipe "*masyarakat berprestasi*" menurut paham kedua ini adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri perilaku seperti yang ada pada masyarakat kapitalis. Menurut Daniel Lerner, diantara ciri masyarakat berprestasi atau modern adalah: (1) adanya kemampuan berfikir yang rasional dan realistis, (2) adanya mobilitas dalam masyarakat dalam arti fisik, sosial, maupun psikologis, (3) adanya transformasi pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan kepada masyarakat hingga mereka mampu berfungsi efektif dalam tata masyarakat (Imam Barnadib, 1987).

Melalui lembaga keuangan internasional IMF atau yang dikenal sebagai Bank Dunia (*World Bank*), teori-teori di atas diadopsi pemerintah Orde Baru untuk direalisasikan dalam wujud program pembangunan. Melalui pembangunan ini Orde Baru berusaha memperoleh dukungan (legitimation) rakyat dengan menjanjikan kemakmuran yang akan dicapainya. Pembangunan yang kemudian "*membius*" kepada hampir seluruh warga negara ini, menjadi wacana penting dalam setiap pidato pejabat negara. Salah satu bukti hasil dari realisasi tersebut adalah dicapainya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata-rata 7% hingga tahun 1992, bahkan mencapai 7,9% pada periode 1971-1980.

Meskipun demikian, walaupun angka pertumbuhan meningkat secara mengejutkan dan pembangunan berlangsung terus menerus; namun angka kemiskinan relatif besar, kesenjangan sosial semakin melebar, angka pengangguran meningkat, dan yang tak kalah mengerikan adalah pengebirian demokrasi dan pelanggaran HAM semakin menjadi jadi. Sehingga secara makro ekonomi terkesan baik, namun secara mikro kurang dirasakan manfaatnya bahkan merugikan rakyat. Hal ini disebabkan, ideologi *developmentalisme* yang telah dielaborasi menjadi program-program pembangunan ini memiliki karakter menindas.

Dari eksekutif-eksekutif yang ditimbulkan akibat pembangunan ini mendorong lahirnya LSM di Indonesia. Diantaranya adalah *Bina Swadaya* yang didirikan Bambang Ismawan tahun 1967, LBH (*Lembaga Bantuan Hukum*) yang didirikan Adnan Buyung Nasution tahun 1970, LP3ES (*Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*) yang didirikan Nono Anwar Makarim tahun 1971, YLK (*Yayasan Lembaga Konsumen*) yang didirikan Permadi tahun 1973, *Sekretaria Bina Desa* oleh Bambang Ismawan dan George J. Aditjondro tahun 1975. Mereka berusaha memberikan bantuan yang awalnya masih bersifat "*karitatif*", namun berkembang menjadi organisasi yang berusaha *meningkatkan swadaya* sumberdaya lokal masyarakat dan terakhir menjadi organisasi yang mendorong tumbuhnya *kekuatan-kekuatan demokrasi* di luar negara.

Keberadaan LSM di Indonesia sejak kelahirannya sampai sekarang telah mengalami proses perubahan panjang, terutama mengenai visi perjuangannya akibat pergumulan ideologis yang dibangun serta tantangan- tantangan eksternalnya. Misalnya, pada *fase awal* adalah benmula dari tumbuhnya komunitas aktivis terutama mahasiswa karena formasi politik Orde Baru era 1970-an. Pada saat itu ilusi para aktivis akan perubahan dan perbaikan sistem mulai berubah menjadi sikap kritis terhadap kecenderungan penyimpangan. Mahasiswa mulai melancarkan kritik lewat berbagai gerakan yang kemudian berujung pada protes terhadap "*strategi pembangunan* Orde Baru. Dari sinilah akhirnya ditemukan arah baru bagi kegiatan alternatif yang berupa Organisasi Non-pemerintah (NGO) atau LSM.

Orientasi dan visi gerakan LSM yang baru lahir ini umumnya masih berupa "*bantuan keringanan dan kesejahteraan*" kepada masyarakat yang dilanda kesusahan; misalnya memberi bantuan makanan kepada orang yang sedang dilanda kelaparan. Oleh karena itu, pada fase ini sepak terjang LSM lebih bersifat "*karitatif*",

Pada *fase selanjutnya* kira-kira tahun 1980-an, LSM sudah mulai mengubah visi gerakan dan perjuangannya. Pada era ini LSM tidak lagi semata-mata memberi bantuan keringanan dan kesejahteraan, tetapi juga membantu mengembangkan swadaya lokal masyarakat. Seperti pelatihan bercocok tanam, berternak, dan sebagainya. Harapannya adalah munculnya kemandirian masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri.

Akhirnya, pada *fase ketiga* yaitu tahun 1990-an, lembaga-lembaga LSM yang ada mulai

membicarakan tentang ideologi, konsep, dan strategi alternatif untuk melakukan transformasi pembangunan. Bagi mereka pembangunan yang ada harus mengutamakan dan memihak rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa maupun pengusaha saja. Bahkan pada era ini melalui proses pencarian paradigmatis dan teoritis, membawa mereka pada pengadopsian pada teori "*civil society*".

Bila tahun 1970-an tipe pelayanan mereka lebih bersifat *karitatif*, sedang pada tahun 1980-an berupa bantuan menuju terwujudnya *swadaya lokal*; maka pada era 1990-an, tipe pelayanan mereka lebih pada "*land reform*" dan bentuk-bentuk pembongkaran system lain yang merugikan masyarakat. Karena itu pada fase pertama, mereka bersifat "*konformis*" terhadap problem politis dengan negara dan fase kedua mereka bersifat "*reformatif*". Namun pada era 1990-an ini mereka lebih bersifat "*radikal-transformatif*".

2. Pembelajaran Politik Rakyat

Bahwa sejak kelahirannya, keberadaan LSM mengandung arti "*oposisi*" di mata negara. Para pejabat negara dalam berbagai kesempatan secara jelas selalu melempar kecurigaan bahkan melakukan berbagai tekanan kepada mereka. Perlakuan demikian malah menjadikan LSM yang ada semakin bersatu. Perkembangan politik yang semakin konservatif di akhir kekuasaan Orde Baru, telah menempatkan LSM pada posisi yang tidak menguntungkan, dimana LSM tidak dipandang sebagai fungsi kontrol tetapi malah dimusuhi. Akibatnya, beberapa LSM yang ada pada saat itu mulai melupakan, sekat-sekat perbedaan, serta pada waktu bersamaan mulai melihat beberapa persamaan diantara mereka, demi menghadapi klaim dan tuduhan bersama dari negara. Upaya aliansi dilakukan sehingga menemukan kekompakannya yang diperkuat dengan adanya ideologi pemersatu yakni "*gerakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*".

Sebagai sebuah gerakan yang memperjuangkan kondisi ketertindasan rakyat akan demokrasi dan HAM di Indonesia; maka LSM yang sudah mengalami proses tiga fase perkembangannya ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan gerakan rakyat. Sejak tahun 1980-an telah dimulai diskursus bagi pemikiran dan visi baru LSM yang menolak dan

mengkritik secara tegas kecenderungan "*developmentalisme*". Kesadaran perlunya "*gerakan rakyat*" ini semakin meluas di hampir semua LSM di Indonesia. Bahkan Adnan Buyung Nasution sebagai salah satu penintis LSM mengatakan, "LBH berketetapan untuk membantu dan bekerjasama dalam membangun kekuatan prodemokrasi yang lebih besar dan *solid*, sehingga mampu menumbuhkan kembali kekuatan rakyat, atau dengan kata lain tumbuhnya "*civil society*"."

Munculnya kesadaran bersama yang berlanjut pada aliansi diantara LSM yang ada termasuk dengan kelompok-kelompok mahasiswa dan kaum intelektual. pada gilirannya mampu memperkuat desakan pengintegrasian LSM ke dalam gerakan demokrasi dan gerakan rakyat. Kecenderungan untuk menjadi bagian dari gerakan rakyat ini merupakan bagian dari pengadopsian nilai-nilai baru gerakan rakyat. Sebagaimana dijelaskan oleh David C. Korten bahwa, gerakan rakyat dalam perspektif Pembangunan Berpusat Rakyat (*People Centered Development*) adalah bertujuan untuk "menggerakkan sebuah *massa kritis* yang penuh dengan inisiatif, mandiri, dan tidak tersentralisir agar mendukung suatu visi sosial". Wujud dari gerakan mendorong tumbuhnya kesadaran kritis rakyat ini tercermin dari "*gerakan advokasi*" LSM terhadap beberapa kasus, antara lain mengenai: *sengketa tanah* (seperti di Kedungombo, Cimacan, dan Jenggawah). *Perburuhan* (antara lain di PT Sritex Solo, PT Great River, dan PT Inti Indorayon Medan), Penculikan aktivis, kasus renovasi pasar Wonosobo Jawa Tengah, dan lainlain. Terhadap advokasi beberapa kasus tersebut umumnya LSM mendampingi masyarakat yang merasa ditindas dan dirampas hak-haknya agar mereka berani menuntut serta melawan penguasa dan pengusaha yang melecehkan hukum termasuk melecehkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Terhadap fenomena politik, nampak upaya-upaya advokasi NGO lewat pemantauan pemilu oleh KIPP, pembelaan terhadap PDI Megawati yang menggugat Negara mengenai kasus 27 Juli, serta ikut mendorong gerakan demonstrasi mahasiswa ke gedung MPR bulan Mei 1998 yang berakhir dengan 'terjungkalnya' Soeharto dari kursi kepresidenan. Dari gambaran tersebut nampak jelas bahwa upaya pemberdayaan dan pembelajaran kepada masyarakat oleh LSM ini adalah menghadapi segenap kekuatan sipil yang dieksploitasi dan dirampas hak-haknya oleh negara dengan negara. Namun demikian harus diakui bahwa tidak sedikit LSM di Indonesia yang hanya 'melacurkan diri' dengan menjual fenomena demonstrasi, kekerasan, dan kerusuhan untuk mengucurkan dana dari luar negeri

demi keuntungan para oknum LSM tersebut. Bahkan disinyalir sekarang ini beberapa LSM jenis ini telah menjalin persekongkolan dengan para politisi di DPR dan MPR demi memuluskan dan mendukung kepentingan-kepentingan sesaat kelompok politik tertentu.

3. Menuju Terbentuknya Civil Society

Dari proses perjuangan panjang "gerakan advokasi dan pemberdayaan" yang dilakukan LSM kepada masyarakat tersebut di atas, harapan akhirnya adalah terwujudnya cita-cita "masyarakat madani" (*civil society*). Yakni masyarakat yang memiliki independensi sikap, mampu memajukan dirinya, serta dapat membatasi intervensi negara ke dalam realitas yang telah diciptakan sebagai ruang kegiatannya sendiri.

Tanda-tanda terbentuknya "*masyarakat madani*" tersebut menurut Muhammad AS Hikam sudah nampak. Hikam menunjukkan misalnya pada sukses-sukses yang diperlihatkan PDI dalam KLB di Surabaya, Mukhtar NU di Cipasung, Majalah Tempo di PTUN, petani Jenggawah, buruh PT Great River, dan sebagainya jelas mengindikasikan adanya tanda-tanda mulai munculnya kekuatan sipil yang tidak bisa ditundukkan oleh Negara. Bahkan indikasi paling mencolok adalah munculnya gelombang aksi mahasiswa yang berhasil "menjungkalkan" Soeharto dari kursi kepresidenan, serta membawa kepada terlaksananya pemilu 1999 yang relatif jujur dan adil. Termasuk juga adalah banyaknya tokoh-tokoh LSM yang ikut mengendalikan negara menjadi eksekutif. Hal ini secara agregatif akan mampu mendorong kepada negara untuk melakukan *sharing* dan memberi keleluasaan kepada kelompok-kelompok strategi dalam masyarakat.

Menurut Bonnie Setiawan, ada tiga tingkatan perkembangan masyarakat sipil sebelum mencapai puncaknya. *Pertama*, adalah "masyarakat alamiah" (*natural society*); yakni masyarakat yang belum mengenal sistem maupun hukum sehingga tipe masyarakat ini masih merupakan masyarakat anarkhi (masih adanya eksploitasi perbudakan dan ketidakadilan). *Kedua* adalah "masyarakat politik" (*political society*); yaitu masyarakat yang sudah mulai mengenal arti politik sebagai utuk mengatur tatanan masyarakat sehingga muncul apa yang disebut "peraturan dan hukum". Sedang yang *ketiga* adalah "masyarakat sipil" (*civil society*), yaitu perkembangan masyarakat yang sudah mengenal, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar atau hak asasi manusia (*human rights*) bagi warganya. Oleh karena itu, tujuan

dan harapan NGO di atas adalah agar bisa tercapai dan terbentuknya tipe masyarakat ketiga: "*masyarakat sipil*" atau "*masyarakat madani*".

Sebagaimana diakui oleh perspektif teori Gramscian, bahwa hubungan antara *negara* dan *civil society* adalah hubungan yang saling mengeliminasi. Hubungan semacam ini menjelaskan bahwa posisi negara (*state*) akan kuat manakala ia menekan dan menindas *civil society*, begitu sebaliknya posisi *civil society* akan kuat manakala mereka mampu mengontrol dan menandingi dominasi Negara (Fiqui Ikhsan, 1996). Karena itu, pada kondisi dimana kekuatan sipil yang di atas angin dengan longgarnya tekanan dari negara, sebagaimana terjadi saat ini, maka banyak aktivis LSM dan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang berkeinginan masuk ke dalam sistem negara untuk ikut mengendalikan negara yang kebijakan-kebijakannya bersifat "*people oriented*". Bila ini terjadi, maka pada tahun-tahun mendatang potret dan karakter negara pada era mendatang (pasca Orde Baru).

C. Penutup

Bahwa salah satu pendekatan rejim Orde Baru dalam menyelenggarakan pembangunan adalah dengan memprioritaskan pertimbangan politik dan menekankan peranan negara (*state*) sebagai salah satu aktor utama pembangunan. Dominasi politik negara atas kekuatan-kekuatan sipil ini dilakukan untuk mengamankan proyek besar "*Pembangunan (Ekonomi) Nasional*" yang dirancangnya bersama lembaga Donor IMF atau yang dikenal sebagai "Bank Dunia" (World Bank). Bersama Bank dunia inilah Orde Baru berupaya melakukan program besar-besaran "*modernisasi*", yakni pembangunan yang diarahkan untuk membawa masyarakat Indonesia dari keadaan "*agraris-tradisional*" menuju masyarakat yang "modern".

Untuk mengamankan rencana besar itulah negara Orde Baru melakukan intervensi dan mengontrol segenap kekuatan sipil yang dianggap mengganggu "pembangunan". Hingga pada klimaknya, negara Orde Baru telah melakukan lebih jauh berupa penindasan terhadap rakyat sipil yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Akibat kebijakan ekonomi yang hanya "memanjakan" konglomerat besar dan para kapitalis asing, serta kebijakan politik yang terus menerus mengekang dan melecehkan nilai-nilai demokrasi dan HAM tersebut menjadikan rakyat pada umumnya dan kekuatan sipil menjadi lemah. Oleh karena itu NGO (LSM) sebagai organisasi sukarela non-pemerintah

terutama pada era 1990-an telah mencoba memberdayakan masyarakat sipil agar mampu berhadapan dengan negara.

Sebenarnya keberadaan LSM di Indonesia telah mengalami proses perkembangan panjang. Paling tidak ada tiga fase perkembangan LSM. *Fase pertama*, tahun 1970-an, LSM lahir dengan orientasi perjuangan "*pemberian bantuan dan kesejahteraan*" kepada masyarakat yang membutuhkan. *Fase kedua* tahun 1980-an adalah fase dimana LSM sudah mengalami transformasi dengan orientasi perjuangan baru yaitu mengembangkan "*swadaya lokal*" masyarakat agar bisa menolong dirinya sendiri. Sedangkan *fase ketiga* tahun 1990-an adalah munculnya LSM yang sudah mencapai penentuan pilihan gerakan pada perjuangan "demokratisasi dan HAM" setelah setelah melalui proses pengumpulan dan pencarian paradigmatik dan teoritis. Melalui upaya perjuangan demokratisasi dan nilai-nilai HAM tersebut, LSM pada waktu itu bersama dengan kekuatan-kekuatan kritis lain mencoba membentuk, pembelajaran dan mendorong tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat agar lebih berdaya ketika berhadapan dengan negara. Melalui berbagai perjuangan dan pendampingan terhadap berbagai kasus yang dialami masyarakat, LSM berharap akan semakin tumbuh keberanian masyarakat terhadap segenap tekanan negara. Meskipun dewasa ini beberapa pengamat yang menyebut tidak sedikitnya LSM yang ada yang hanya menjual kecacauan bangsa kepada lembaga donor luar negeri demi keuntungan oknum-oknum pengurusnya.

Akhirnya, dari keseluruhan upaya LSM tersebut adalah agar tercapai cita-cita terwujudnya "masyarakat madani" (*civil society*). Sehingga tidak lagi sebagai "masyarakat alamiah" (*natural society*) atau "masyarakat politik" (*political society*): akan tetapi sudah dicapai tingkatan terakhir yaitu "*civil society*". Yakni tipe masyarakat yang memiliki independensi sikap, mampu memajukan dirinya, serta dapat membatasi intervensi negara ke dalam realitas yang telah mereka ciptakan sebagai ruang kegiatannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mochtar Mas'ud. 1997. *"Politik, Birokrasi, dan Pembangunan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bonnie Setiawan. 1996. *"Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil"*. Prisma No. 7 Juli 1996.
- Mansour Faqih, 1996. *"Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Barnadib. 1987. *"Pendidikan Perbandingan (Buku Dua)"*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Abdul Latief. 1993. *"Keterkaitan dan Padanan antara Pendidikan dan Penyediaan Tenaga Kerja dalam Pembangunan Nasional"*. Naskah pidato pada Rapat Kerja Depdikbud, yang dimuat pada Jurnal Pendidikan ISPI No. 12 September 1993. Jakarta: Lanto Putra Perkasa.
- David C. Korten . 1993. *"menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustakan Sinar Harapan.
- M Ryas Rasyid. 1994. *"Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan"* Jurnal Ilmu Politik No.17.
- Muhammad AS Hikam. 1996. *"Demokrasi dan Civil Society"*. Jakarta: LP3ES.
- Faiqul Ikhsan. 1996. *"Khittah 1926 dan Perilaku Politik Ulama MI"*. Thesis S-2 Pasca sarjana UGM Yogyakarta.